

MEMBANGUN MASYARAKAT INFORMASI BERBASIS KELOMPOK

Manik Sunuantari dan Dkk*

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jakarta
manik_sunuantari@yahoo.com

Abstrak

Sebagai bagian dari masyarakat dunia, maka Indonesia ikut terlibat dalam membangun tatanan dunia yaitu membangun masyarakat informasi sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditetapkan dalam WSIS tahun 2005 di Tunisia. Hal itu tidak terlepas dari adanya keinginan dari masyarakat untuk berubah, tidak hanya sekedar melek informasi, tetapi juga mampu mendayagunakan informasi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Adanya kesenjangan informasi dalam masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, menyebabkan masyarakat harus bangkit untuk memberdayakan diri membangun masyarakat informasi. Kemunculan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) menjadi salah satu jawaban dalam rangka membangun masyarakat informasi. Sebagai suatu kelompok KIM diharapkan dapat membantu mengatasi kesenjangan informasi yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian maka harapan hidup yang lebih baik dapat terwujud, khususnya kesejahteraan secara ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran akan peran serta KIM dalam membangun masyarakat informasi, khususnya KIM Kraton Kidul Pekalongan Bertolak dari pemahaman tentang masyarakat informasi yang dikemukakan Frank Webster. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus di KIM Kraton Kidul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KIM Kraton Kidul telah mampu membantu mengatasi kesenjangan informasi yang ada. Melalui berbagai aktivitas yang dilakukan, KIM telah mengubah paradigma masyarakat dalam pengelolaan informasi. Masyarakat didorong untuk terlibat aktif dalam memberdayakan diri mereka sendiri khususnya di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Kesadaran akan pentingnya informasi dalam kehidupan masyarakat menjadi suatu dasar yang sangat penting untuk membangun masyarakat informasi.

Kata Kunci : Masyarakat Informasi, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Abstract

As part of world community, then Indonesia involves in world order developing that is building the information society defined in the WSIS 2005 in Tunisia. It is inseparable from the desire of people for change, not just know about the information but also are able to utilizing information for improve their well being life. Because there is a gap in the information society which causes people to empower themselves to build the information society. Emerging the Society Information's Group (Kelompok Informasi Masyarakat /KIM) became one of the answers in order to build an information society. As a group of KIM expected to help overcome the information gaps in all regions of Indonesia. Thus, the hope for a better life can be realized, especially in the economic welfare. This research aims to provide an overview of the KIM's role in building the information society, especially KIM Kraton Kidul Pekalongan starting from an understanding of the information society stated Frank Webster. The method that used in this research is a case study in KIM Kraton Kidul. The results showed that KIM Kraton Kidul has been able to help overcome the information gap. Through the various activities which is conducted, KIM has changed the paradigm of the society in information management. People are encouraged to be actively involved in empowering themselves especially in the Technology, Information and Communication (ICT). Awareness the importance of information in society becomes a very important basis for building the information society.

Key word : Information Society, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Atwar Bajari - Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran Bandung: atwarbajari@gmail.com
Ninis Agustini Damayani-Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad Bandung: ninis_agustini@yahoo.com
Musa Hubeis -Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor : hubeis.musa@yahoo.com

Berbicara masyarakat informasi menjelaskan kaitan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya teknologi modern seperti internet. Ketergantungan ini nampak dalam aktivitas yang dilakukan masyarakat sehari-hari. Sehingga kehadiran media massa modern dalam ruang publik dan privat menjadi tak terelakkan lagi. Semangat untuk membangun masyarakat informasi adalah sebuah keniscayaan, manakala peradaban manusia semakin maju. Derasnya arus informasi yang berkembang di masyarakat seringkali tidak diimbangi dengan peningkatan pemahaman dan pendidikan masyarakat dalam bidang teknologi komunikasi. Kesenjangan dalam adopsi teknologi menjadi sesuatu yang lazim. Namun kendala tersebut harus segera diatasi jika masyarakat tidak ingin semakin tertinggal. Oleh karena itu penduduk di wilayah pedesaan harus dipersiapkan untuk mendapatkan manfaat TIK dalam kehidupan mereka. Melalui penguasaan teknologi informasi yang baik, maka akan meningkatkan daya saing daerah.

Tuntutan akan tatanan kehidupan baru sesuai tatanan dunia bukanlah pekerjaan mudah. Kesenjangan informasi masih terjadi di beberapa daerah, terutama pedesaan. Dalam rangka mengatasi kesenjangan tersebut, Indonesia melalui Kementrian Informasi dan Komunikasi mendorong terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), baik di tingkat daerah hingga kelurahan. Pelayanan untuk memanfaatkan TIK dapat dilakukan melalui KIM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kemunculan KIM tidaklah semudah membalikkan tangan, berbagai kendala hadir manakala KIM terbentuk. Hal ini tidak terlepas dari pandangan masyarakat yang masih berorientasi pada Klompencapir era orde baru. Paradigma komunikasi yang dibangun dalam Klompencapir adalah topdown, sementara pada KIM bottom up. Perbedaan ini cukup menyolok, karena KIM lahir atas dasar kebutuhan dari masyarakat sendiri sehingga KIM bukanlah bagian dari kebijakan pemerintah. Adanya perubahan paradigma tersebut, cukup ampuh untuk mendorong masyarakat membangun kelompok-kelompok sejenis dalam rangka memberdayakan masyarakat dalam bidang TIK. Melalui berbagai aktivitas yang dilakukan KIM diharapkan adanya perubahan hidup bagi setiap anggota KIM, bahkan masyarakat sekitarnya.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang turut serta dalam Konferensi Tingkat Tinggi Dunia mengenai Masyarakat Informasi (World Summit on the Information Society/WSIS) tahun 2003 di Swiss dan tahun 2005 di Tunisia, berusaha mengimplementasikan penggunaan Teknologi Informasi dan Komu-

nikasi (TIK) dalam pengelolaan pembangunan yang berpusat pada masyarakat. Strategi pembangunan yang bertumpu pada TIK diharapkan dapat mempersempit kesenjangan informasi melalui teknologi digital antara pusat perkotaan dan pedesaan. Daerah akan memiliki daya saing secara sosial ekonomi dan menjadi bagian dalam perubahan tatanan dunia seperti yang diamanatkan dalam WSIS.

Komunikasi Kelompok

Menurut Robert Bales (dalam Sumadi Dilla; 2007; 45-46) dikatakan bahwa yang dimaksud kelompok adalah sejumlah orang yang terlibat dalam satu pertemuan yang bersifat tatap muka (face to face) dimana setiap anggota mendapat kesan atau penglihatan antara satu sama lainnya yang cukup kentara sehingga baik pada saat timbul pertanyaan maupun sesudahnya, dia dapat memberikan tanggapan kepada masing-masing sebagai perorangan.

Sejumlah orang yang memiliki kebutuhan sama akan membangun satu keinginan untuk bergabung dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi kelompok. Adanya keinginan yang sama akan membuat keeratn hubungan antar anggota. Berbagai pertemuan yang dilakukan dimaksudkan untuk membangun kesamaan persepsi, baik itu melalui komunikasi tatap muka maupun bermedia.

Kebutuhan kelompok salah satunya adalah untuk membangun keakraban dalam kelompok. Kebutuhan afeksi adalah kebutuhan untuk memiliki hubungan pribadi yang hangat, akrab dengan orang lain. (Pace & Faules; 2013; 312). Meskipun tidak semua orang menginginkan keakraban, namun pada dasarnya selalu mempunyai keinginan untuk bergabung dengan orang lain. Bahkan bila kelompok tersebut memuaskan kebutuhannya, maka seseorang akan berbuat sesuatu untuk kelompok meskipun usahanya tersebut minimal. Seperti hasil penelitian yang dilakukan Schutz (dalam Pace & Faules; 2013; 313), daripada dipaksa masuk ke dalam suatu kelompok atau tim yang mungkin tidak memiliki kemampuan tertinggi untuk memuaskan kebutuhan, seringkali kita dengan sukarela bergabung dengan kelompok atau bekerja dengan suatu tim yang sedikitnya memberi beberapa kepuasan minimal.

Untuk membentuk suatu kelompok tidaklah mudah, meskipun dibentuk secara sukarela. Ibaratnya manusia, maka kelompok akan melalui sejumlah tahapan untuk tumbuh dan berkembang. Adapun tahap perkembangan kelompok berkaitan dengan tugas dan hubungan antarpersona (Pace & Faules; 2013; 317-318):

Pembentukan. Anggota tim diorientasikan pada pe-

kerjaan apa yang harus dikerjakan, pemimpin ditunjuk memberikan pengarahan, aturan pokok yang mengatur pekerjaan anggota kelompok, dan agenda yang harus diikuti. Anggota tim disesuaikan dengan anggota lainnya dengan pekerjaan yang harus dilakukan.

Gangguan. Tim menentukan peraturan dan kepemimpinan, yang memunculkan konflik antarpersona. Sehingga harus dilakukan pembuatan penugasan dan peraturan untuk mengatur pekerjaan dan interaksi, menentukan organisasi dan struktur kelompok. Tim perlu menyusun proses secara teratur untuk membuat keputusan yang memberi kesempatan kepada anggota tim untuk melaksanakan penilaian yang bebas.

Penormaan. Anggota tim mulai ikut serta dalam kerjasama yang membangun, dan konflik dipandang sebagai suatu kebutuhan untuk melihat suatu masalah dari semua segi. Anggota mulai berbagi gagasan dan perasaan, saling memberi umpan balik satu sama lain. Masing-masing merasa cocok satu sama lain, muncul keterbukaan, memiliki keterikatan moral serta interaksi tinggi.

Pelaksanaan. Tim saling bergantung, di samping mandiri. Keselarasan muncul dalam bentuk kebebasan perorangan dan penekanan yang kuat pada produktivitas. Masing-masing akan saling memberi dukungan, saling bekerjasama sekaligus bersaing, ada dukungan dalam pembuatan keputusan dan menyelesaikan masalah.

Pembentukan suatu kelompok yang berasal atas dasar kebutuhan mereka sendiri seperti halnya kelompok yang dibentuk akan mengalami tahapan yang serupa. Awal pembentukan kelompok akan terjadi proses penyesuaian anggota satu sama lain yang dapat memunculkan adanya konflik. Namun bila anggota merasakan adanya ikatan kuat antar anggota, maka konflik bukanlah menjadi suatu gangguan tetapi justru memicu anggota untuk terus bekerja. Bahkan dengan semakin eratnya hubungan akan memberikan keterbukaan bagi yang lain. Dorongan inilah yang menyebabkan kelompok bertahan untuk terus bekerja mencapai tujuan yang diinginkan. Bahkan dalam perkembangannya kelompok akan mempengaruhi perilaku komunikasi anggota.

Efektivitas kelompok akan sangat mempengaruhi dinamika kelompok bahkan akan membuat kelompok semakin berkembang. Adapun beberapa faktor situasional yang mempengaruhi kelompok (Jalaluddin Rakhmat; 2011; 158-104) : Ukuran Kelompok, Jaringan Kelompok, Kohesivitas Kelompok, Kepemimpinan

Selain itu, efektivitas kelompok juga akan terlihat dari cara kelompok berkomunikasi satu sama lain. Dalam berkomunikasi suatu kelompok akan mempunyai karakteristik sebagai berikut :

Kepribadian kelompok. Kelompok memiliki kepribadian

kelompok sendiri, berbeda dengan kepribadian individu para anggotanya. Jadi kepribadian kelompok membawa pengaruh pada kepribadian individu.

Norma kelompok. Norma di dalam kelompok dapat mengidentifikasi anggota kelompok itu berperilaku. Tiap kelompok menetapkan sistem nilai dan konsep perilaku normatif mereka sendiri dan akan menjadi norma individu dalam kelompok.

Kohesivitas kelompok. Kohesivitas kelompok merupakan kekuatan yang tarik menarik di antara anggota-anggota kelompok.

Penentuan tujuan anggota-anggota kelompok untuk mencapai keberhasilan tujuan kelompok dan menghindari kegagalan tujuan kelompoknya (<http://www.Anneahira.com/teori-komunikasi-kelompok>)

Kelompok akan bertahan jika seluruh anggota mampu untuk mengadopsi norma kelompok. Adanya kohesivitas kelompok akan menambah kekuatan kelompok dalam mencapai tujuan kelompok. Tentu saja harus dibangun kesadaran pada masing-masing anggota untuk memahami tujuan kelompoknya. Pemahaman yang baik atas tujuan kelompok akan mendorong anggota memiliki kontribusi bagi kelompoknya sekecil apapun. Masing-masing anggota harus melengkapi kelemahan anggota yang lain, kebersamaan yang dibangun atas kesadaran diri masing-masing akan makin menguatkan kehadiran kelompok dalam masyarakat.

Pembangunan Berbasis Pemberdayaan

Dalam rangka membangun masyarakat informasi, dibutuhkan kemandirian masyarakat dalam memanfaatkan informasi. Penerapan teknologi baik dalam bentuk software maupun hardware harus disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah. Setiap anggota masyarakat bertanggungjawab untuk menentukan tujuan dan memilih strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Pengembangan kepemimpinan lokal, peningkatan strategi kemandirian, peningkatan informasi, komunikasi, relasi, dan keterlibatan anggota masyarakat merupakan inti dari proses pengembangan masyarakat lokal yang bernuansa bottom-up. (Edi Suharto; 2005; 45)

Pemberdayaan merujuk pada kekuasaan atau keberdayaan, menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (Edi Suharto; 2005; 58): Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom) dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.; Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan

memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.; Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Untuk itu diperlukan kerjasama semua pihak, informasi tidak lagi bersifat topdown, tetapi lebih pada mendorong individu dalam masyarakat ikut terlibat aktif dalam proses pembangunan. Masyarakat diberikan kebebasan dalam memanfaatkan semua potensi yang ada sehingga memungkinkan mereka dapat meningkatkan kesejahteraan hidup. Menurut Parsons (1994; 106) ada tiga dimensi pemberdayaan: Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.; Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.; Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan.

Masyarakat Informasi

Masyarakat informasi adalah masyarakat yang sangat bergantung pada informasi. Menurut Mansell dan Weihn: "These technologies do not create the transformation in society by themselves; they are designed and implemented by people in their social, economic, and technological context". (dalam Jan Servaes; 2007; 175)

Lebih lanjut dikatakan oleh Frank Webster (2006; 8-21) bahwa ada lima kriteria untuk mengidentifikasi masyarakat informasi yaitu melalui : teknologi, ekonomi, perubahan dunia kerja, spasial, dan budaya. Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

Technological (Teknologi). Konsep masyarakat informasi dari kriteria teknologi, secara umum berpusat pada inovasi yang luar biasa dalam bidang teknologi. Bahwa dengan adanya teknologi baru menyebabkan terjadinya perubahan sosial secara sistemik, dengan ide utamanya menekankan pada proses, penyimpanan, dan penyebaran informasi dengan teknologi informasi pula maka masyarakat seluruh penjuru dunia dapat terhubung secara virtual. Pada perkembangannya teknologi ini disebut dengan istilah ICT (Information and Communication Technology), yaitu penggunaan teknologi digital dalam pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran informasi. Hal ini menjadi dasar terbentuknya 'masyarakat informasi', teknologi ini memberikan akses yang luas dalam masyarakat.

Economic (Ekonomi). Pada bagian ini lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi sebagai aktivitas informasi, jadi masyarakat informasi diukur dari nilai ekonominya. Masyarakat informasi dipandang se-

bagai aktivitas ekonomi dengan berlaku sebagai produsen informasi, birokrasi umum, dan privat.

Occupational (Ketenagakerjaan). Adanya masyarakat informasi dilihat dari adanya perubahan dalam dunia kerja, dimana pekerjaan dalam bidang informasi mendominasi, konsep ini berdasarkan pada perspektif sosiologi. Perubahan dalam pekerjaan ini, tentunya membawa dampak secara ekonomi. Perubahan dalam penyebaran pekerjaan merupakan inti dari teori masyarakat informasi yang paling berpengaruh. Peningkatan tenaga kerja di bidang informasi secara mendasar mengindikasikan datangnya masyarakat informasi.

Spasial (Dimensi Ruang). Penekanannya pada basis teknologi jaringan informasi, pengolahan informasi yang cepat dan efektif serta pertukaran ekonomi menjadi global, maka akan mengurangi hambatan dalam ruang. Perusahaan dapat mengembangkan strategi global, keterbatasan dalam geografi (ruang) bukanlah suatu hambatan, begitu juga hambatan waktu tidak lagi menjadi kendala, perekonomian akan berjalan terus. Sehingga informasi terhubung melalui jaringan yang menghubungkan kota, wilayah, bangsa, di seluruh dunia.

Cultural (Budaya). Konsep terakhir dalam membahas masyarakat informasi, adanya perubahan budaya dalam masyarakat dengan meningkatnya kebutuhan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Channel televisi semakin meningkat jumlahnya karena digitalisasi televisi, bahkan diperkuat dengan disatukannya teknologi video, kabel, dan channel satelit, dan banyak lagi. Radio tidak lagi berada di depan rumah, tetapi tersebar di seluruh sudut ruangan rumah, dalam mobil, di kantor, dengan walkman dan iPod dimana-mana. Film menjadi bagian penting dalam lingkungan informasi, kenyataannya penonton bioskop mengalami penurunan. Film jumlahnya lebih banyak dari sebelumnya, disiarkan di televisi, atau video yang kita sewa, maupun membeli di toko. Jika ke stasiun kereta api dan bus, bisa dilihat banyak buku dan majalah, sebagai tambahan audiotape, compact disk, dan radio semua menyediakan musik, puisi, drama humor, dan pendidikan. Surat kabar tersebar dimana-mana dengan judul baru datang ke rumah secara gratis.

Dalam membangun masyarakat informasi, tentunya tetap harus memperhatikan kebudayaan lokal. Meningkatnya kebutuhan informasi masyarakat tidak terelakkan lagi ketika informasi menjadi suatu hal penting dalam mendorong perubahan ekonomi. Tidak hanya masyarakat sebagai individu tetapi juga sebagai kelompok yang terlibat dalam proses pembangunan. Kebutuhan akan media informasi menjadi suatu keharusan, sehingga masyarakat akan kebanjiran informasi.

Informasi tersebar di berbagai media, informasi hadir dimana-mana. Bahkan dengan informasi maka hambatan akan ruang dan waktu bukanlah menjadi suatu kendala dalam mengembangkan roda perekonomian masyarakat.

Dalam dunia kerja, teknologi komunikasi dan informasi menjadi andalan utama dalam pengembangan bisnis. Tuntutan akan penggunaan teknologi dalam dunia kerja tidak lagi menjadi asing, bahkan bagi para calon pekerja ataupun yang berkecimpun dalam pekerjaan lain. Peningkatan penggunaan teknologi ini tentu saja diharapkan memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat.

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Pada KTT Dunia tentang Masyarakat Informasi di Geneva tahun 2003 dan dilanjutkan di Tunisia tahun 2005 menyebutkan, masyarakat informasi adalah suatu konsep yang berubah-ubah yang telah mencapai tingkat-tingkat berbeda di seluruh dunia, mencerminkan taraf perkembangan yang berbeda. Semua pemangku kepentingan memiliki peran penting dalam membangun masyarakat informasi, terutama melalui kemitraan.

Pemerintah memiliki peran utama dalam mengembangkan dan menjalankan e-strategi yang luas, berpandangan ke depan, dan berkesinambungan. Sektor swasta dan masyarakat sipil, dalam dialog dengan pemerintah, memiliki peran penting sebagai penasihat dalam merancang e-strategi nasional.

Komitmen sektor swasta penting dalam mengembangkan dan menyebarkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi infrastruktur, konten, dan aplikasi. Sektor swasta tidak hanya memainkan peran dalam konteks pengembangan berkesinambungan yang luas.

Komitmen dan keterlibatan masyarakat sipil adalah sama pentingnya dalam menciptakan masyarakat informasi yang sederajat, dan dalam mengimplementasikan inisiatif untuk pembangunan yang terkait dengan TIK.

Institusi internasional dan regional, termasuk institusi keuangan internasional memiliki peran kunci dalam pengintegrasian penggunaan TIK dalam proses pengembangan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk membangun masyarakat informasi dan untuk mengevaluasi kemajuan yang telah dibuat. (Dokumen Hasil Sidang KTT Dunia Mengenai Masyarakat Informasi, Tunisia; 2005)

Dalam PerMen Kominfo RI No: 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial, pasal 1 disebutkan: Lembaga Komunikasi Pedesaan adalah Kelompok Informasi Masyarakat atau kelompok sejenis lainnya, selanjutnya disingkat KIM, yang dibentuk oleh ma-

sarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah. Pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial diarahkan untuk mewujudkan jejaring diseminasi informasi nasional; Mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan serta sebagai upaya meningkatkan nilai tambah; Mendorong peningkatan kualitas media massa dan kecerdasan publik dalam mengkonsumsi informasi; dan Membangun masyarakat informasi

Untuk membangun masyarakat informasi, maka peran KIM nyata-nyata sangat dibutuhkan, sehingga Kemeninfo perlu untuk menguatkan regulasi yang sudah ada dalam bentuk Peraturan Menkominfo No.22/PER/M.KOMINFO/12/2010, tentang KIM bahwa yang dimaksud dengan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.

Berdasarkan Juknis Kemeninfo 2010 tentang KIM, maka arah pengembangan KIM terdiri dari tahap-tahap sebagai berikut:

Tahap ke-1 atau KIM 1, pada tahap ini titik berat aktivitas KIM ialah melakukan fungsi memonitor informasi dari berbagai sumber informasi yang berbasis media konvensional seperti radio, televisi dan surat kabar, untuk kemudian mendiskusikan isi informasi dan menerapkan sebagian isi yang sesuai dan selanjutnya menyebarkannya kepada anggotanya (kedalam).

Tahap ke-2 atau KIM 2, pada tahap ini para anggota KIM sudah mampu menjadi agen pembangunan, dalam arti sudah mampu mengembangkan gagasan. Mengolah informasi baru untuk melakukan perubahan dalam masyarakat ke arah lebih baik untuk kemajuan masyarakat (keluar).

Tahap ke-3 atau KIM 3, pada tahap ini KIM sudah memiliki kemampuan tahap 2 dan sudah mampu mengakses media baru seperti internet.

Tahap ke-4 atau KIM 4, pada tahap ini KIM sudah memiliki kemampuan tahap 3 dan sudah bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan usahanya, baik untuk promosi maupun untuk transaksi. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan menggunakan fasilitas sendiri jika telah memilikinya, maupun dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di lingkungannya. (Juknis Kemeninfo, 2010)

Untuk mencapai masing-masing tahapan tersebut KIM harus melakukan berbagai aktivitas sebagai berikut:

Meningkatkan kesadaran anggota KIM tentang pentingnya mengakses dan mendayagunakan informasi yang bisa meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yaitu dengan memanfaatkan berbagai informasi melalui media yang ada serta membangun jaringan dengan pihak lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Meningkatkan kemampuan KIM dalam melakukan kampanye perubahan sosial dengan teknik pemasaran sosial dan juga pemberdayaan masyarakat melalui social engineering, yaitu dengan memanfaatkan berbagai media untuk melakukan pemasaran atau literasi informasi sehingga masyarakat mampu memanfaatkan informasi tersebut untuk kesejahteraan hidupnya.

Meningkatkan kemampuan KIM dalam menggunakan media baru (internet) sehingga akan meningkatkan literasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi dan mengupayakan agar infrastruktur informasi dapat disediakan secara murah dan berkualitas. Melalui media baru maka informasi tersebut semakin cepat dapat diakses masyarakat, sehingga mempercepat terbangunnya masyarakat informasi.

Sebagai tahapan ke-4 (tahap akhir) KIM yang mandiri maka anggota KIM harus mempunyai kemampuan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan usahanya, baik untuk promosi maupun untuk transaksi, diperlukan adanya dukungan layanan informasi yang menggunakan jasa e-business baik yang dikelola oleh KIM sendiri maupun yang di kelola oleh lembaga lain. Yaitu dengan mendorong masyarakat untuk menggunakan internet sebagai media untuk meningkatkan kehidupannya secara ekonomi.

Namun demikian, secara keseluruhan aktivitas KIM di masing-masing daerah disesuaikan dengan kebutuhan kelompok dan masyarakat sekitar. Sehingga bisa dipahami bahwa KIM di setiap wilayah tidak akan sama pertumbuhan dan perkembangannya. Pada dasarnya KIM berdiri atas dasar kebutuhan masyarakat, sehingga setiap aktivitas yang dilakukan mengacu pada kepentingan masyarakat. Fokus kegiatan yang diutamakan adalah peningkatan akses informasi untuk kelompok dan masyarakat sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kehidupan secara ekonomi.

Secara keseluruhan inovasi yang dilakukan KIM diarahkan pada upaya mewujudkan masyarakat informasi sebagai satu tahap peradaban masyarakat global yang memfungsikan informasi sebagai kekuatan dan sumberdaya kehidupan manusia yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Oleh karena itu KIM harus mampu mengikuti perkembangan teknologi dan komunikasi sehingga dapat memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhannya. Karakteristik masyarakat informasi yang akan diwu-

judkan ialah masyarakat informasi yang sejahtera tidak saja dari perspektif ekonomi tetapi juga sosial dan budaya. (Juknis Kemeninfo, 2010)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran nyata tentang keadaan permasalahan yang diteliti, dengan data yang terkumpul sebagaimana ada pada saat penelitian akan diolah dengan berdasarkan analisa, secara ilmiah melalui metode berfikir deduksi dan induksi sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

Jenis metode deskriptif yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus atau penelitian kasus (case study), Studi kasus bersifat menjelajah secara luas, tetapi juga mendalam, namun pada objek tertentu. Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus yang kemudian dari sifat-sifat yang khas akan dijadikan suatu hal yang umum. Teknik pengumpulan data dengan melibatkan teknik observasi, wawancara kepada beberapa informan, serta kepustakaan. Untuk menguatkan hasil wawancara, juga digunakan angket untuk mendapatkan gambaran atas obyek penelitian.

Penelitian ini menggunakan studi kasus di KIM Kelurahan Kraton Kidul Kota Pekalongan, KIM Kraton Kidul merupakan KIM yang bertumpu pada aktivitas. Bahkan berkat aktivitas yang telah dilakukannya, KIM Kraton Kidul Pekalongan telah beberapa kali mendapatkan penghargaan dari pemerintah dan menjadi salah satu KIM percontohan di Indonesia. Selain itu KIM Kraton Kidul merupakan KIM dengan anggota yang beragam dari usia, pendidikan, dan status sosial ekonomi.

Hasil dan Pembahasan

Kota Pekalongan terletak di dataran rendah Pantai Utara pulau Jawa dengan ketinggian 1 m di atas permukaan laut Jawa. Batas administratif sebelah utara laut Jawa, sebelah Timur kabupaten Batang, sebelah Selatan kabupaten Pekalongan dan kabupaten Batang. Kota Pekalongan memiliki luas wilayah ± 45 km². Keadaan tanah di kota Pekalongan berwarna agak kelabu. Secara administratif terbagi atas 4 kecamatan, yaitu : kecamatan Pekalongan Timur, Pekalongan Barat, Pekalongan Utara dan Pekalongan Selatan, dan setelah pemekaran terbagi atas 47 kelurahan. Pekalongan dikenal mendapat julukan kota batik, karena batik Pekalongan memiliki corak yang khas dan variatif. Kota Pekalongan memiliki pelabuhan perikanan terbesar di Pulau Jawa. Pelabuhan ini sering menjadi transit dan

area pelelangan hasil tangkapan laut oleh para nelayan dari berbagai daerah. Selain itu di kota Pekalongan banyak terdapat perusahaan pengolahan hasil laut, seperti ikan asin, terasi, sarden, dan kerupuk ikan dalam bentuk industri baik berskala besar maupun rumah tangga. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kota Pekalongan menempati ranking 5 se-Jawa Tengah, dimana mengalami peningkatan dari tahun 2005 sebesar 71,9 dan tahun 2010 sebesar 74,47, sementara itu IPM rata-rata Jawa Tengah sebesar 71,6. Untuk tahun 2013 ini, Pekalongan mengalokasikan APBD ± Rp. 636 miliar, berdasarkan RAPBD 2013, dengan perkiraan untuk belanja pegawai 53 % serta belanja pembangunan 47 %.

Pekalongan lahir berdasarkan terbentuknya Gumen-tee sebagai pijakan dasar hukum kotapraja Pekalongan 1 April 1906 dengan mengacu pada sesanti Sengkolo Rasa Swarganing Bumi 9 Sapar 1824 tahun Jawa. Dan ini menjadi tonggak asal usul pemerintahan Kota Pekalongan dalam menentukan hari ulang tahun Pekalongan dan baru diperingati pada tahun 2007. Selain itu penduduk kota Pekalongan kental dengan nuansa religiusnya karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Bahkan sampai sekarang masih banyak tradisi Islam yang dianut masyarakat, seperti syawalan dan sedekah bumi.

Sebagai kota yang berpenduduk Jaawa, maka tidak dapat dipungkiri adanya tradisi Jawa yang masih dilakoni masyarakat, yang digabungkan dengan agama Islam. Berbagai upacara adat yang berdasar budaya Jawa dan agama Islam masih dilakukan masyarakat Pekalongan. Adapun upacara adat yang berkaitan dengan keagamaan Islam antara lain : upacara kelahiran, khitanan, pernikahan, kematian (3 hari, 7 hari, 40 hari, dan seterusnya) yang dikenal dengan upacara daur hidup. Sedangkan upacara adat yang berlaku berhubungan dengan bulan Ramadhan adalah :

Sya'banan. Dilakukan pada malam tanggal 15 Sya'ban, sehabis sholat Maghrib dengan cara membaca surat Yasin sebanyak tiga kali dilanjutkan dengan membaca doa dan sholat Isya berjamaah. Selanjutnya jamaah bersilaturahmi hingga pukul 24.00. Pukul 01.00 dilanjutkan anak-anak gadis sampai Subuh, pagi hari jamaah melakukan ziarah kubur.

Bersih kubur. Dilakukan tanggal 15 Sya'ban, masyarakat melakukan ziarah kubur dan berdoa dilanjutkan dengan membersihkan kuburan keluarga masing-masing.

Syawalan/Lopisan. Dilaksanakan tanggal 8 Syawal setelah Idul Fitri, pada syawalan ini disediakan lotekan untuk semua pengunjung selain makan lopis. Biasanya dilakukan pembuatan lopis raksasa yang akan dinikma-

ti masyarakat Pekalongan pada Syawalan.

Menurunnya angka kemiskinan memungkinkan tercapainya angka kesejahteraan masyarakat meskipun tidak terlalu drastis. Tetapi jika tidak dimulai dengan usaha yang serius tentu saja mustahil hal tersebut tercapai. Oleh karena itu KIM sebagai mitra Pemda Kota Pekalongan diharapkan mampu menjembatani kesenjangan informasi yang terjadi dalam masyarakat dalam bentuk apapun dan dengan hasil sekecil apapun. Jika usaha ini dilakukan secara terus menerus maka masyarakat akan semakin menyadari dan mereka semakin terdorong untuk terus berusaha dan berkarya. Sesuai dengan kebijakan Pemda Pekalongan dalam open source, maka masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap semua proses pembangunan yang berjalan di masing-masing wilayahnya. Dengan demikian akan membantu Pemda dalam mensukseskan pemerataan pembangunan, terutama dalam kebijakan otonomi daerah. Proses pengawasan tidak dilakukan di pusat, tetapi dilakukan oleh masyarakat secara langsung melalui LPM, PKM, Karang Taruna, PKK, bahkan KIM.

Dalam sosialisasi Migrasi FOSS Pemerintah Pekalongan pada 11 Desember 2012, dikemukakan bahwa, salah satu perkembangan strategis yang menjadi kekuatan pendorong kunci bagi pembaharuan di berbagai sektor kehidupan adalah perkembangan di bidang teknologi, informasi dan komunikasi (TIK). TIK telah menjadi engine of innovation bagi peradaban manusia dewasa ini, yang bukan saja membuka akses informasi yang tak terbatas, namun sekaligus membuka peluang hadirnya 'banjir informasi' yang tanpa pengelolaan yang baik, secara ekstrim berpotensi 'melumpuhkan organisasi', atau setidaknya menegasikan kemungkinan optimalisasi perkembangan TIK bagi peningkatan kinerja organisasi. Perkembangan IPTEK yang sangat dinamis, dengan tempo perubahan yang makin lama cenderung makin cepat, menyajikan "banjir" pilihan teknologi termasuk teknologi informasi dan komunikasi untuk digunakan sebagai faktor enabler, transformer, dan accelerator pencapaian misi"

Untuk mencapai misi tersebut maka, Pemkot Pekalongan mulai berbenah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka mendorong terbangunnya masyarakat informasi di kota Pekalongan. Salah satunya adalah melalui KIM dalam melakukan pengelolaan dan akses informasi bagi masyarakat. Keterlibatan KIM dalam akses informasi diharapkan memberikan andil besar dalam menurunkan angka kemiskinan. Berbagai pelatihan dan penyediaan infrastruktur dilakukan hingga di tingkat RT. Dengan cara ini akan menurunkan gap informasi antara pemerintah dan masyarakat.

Kelurahan Kraton Kidul

Pemerintah Kota tidak mungkin berjalan sendirian dalam melakukan proses pembangunan, berbagai badan ataupun lembaga swasta dari level RT, RW, Kelurahan, Kecamatan semua dilibatkan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Hal ini dilakukan agar masyarakat juga ikut bertanggungjawab terhadap program yang sudah mereka rancang sendiri. Sehingga pada akhirnya masyarakat akan mampu menyerap hasil pembangunan yang dapat digunakan bagi kehidupan mereka. Sedikit demi sedikit usaha ini diharapkan dapat membantu mengurangi angka kemiskinan hingga di level bawah, yaitu RT. Menurunnya angka kemiskinan memungkinkan tercapainya angka kesejahteraan masyarakat meskipun tidak terlalu drastis. Tetapi jika tidak dimulai dengan usaha yang serius tentu saja mustahil hal tersebut tercapai. Oleh karena itu KIM sebagai mitra Pemda Kota Pekalongan diharapkan mampu menjembatani kesenjangan informasi yang terjadi dalam masyarakat dalam bentuk apapun dan dengan hasil sekecil apapun. Jika usaha ini dilakukan secara terus menerus maka masyarakat akan semakin menyadari dan mereka semakin terdorong untuk terus berusaha dan berkarya.

Kelurahan Kraton Kidul termasuk dalam wilayah Pekalongan Barat, berbatasan dengan kelurahan Kergon dan Podo Sugih. Wilayah Pekalongan Barat termasuk wilayah yang padat penduduk, meskipun berlokasi di perkotaan. Bahkan termasuk jalur lalu lintas yang ramai, karena melewati jalan raya Pantura yang sarat dengan kepadatan lalu lintas darat, baik mobil angkutan maupun mobil pribadi. Jalan raya ini tidak pernah kosong dengan arus mobil, terutama pada saat liburan maupun hari-hari libur nasional yang lain. Bahkan lokasi Kraton Kidul tidak jauh dari lokasi stasiun kereta api, sebagai salah satu alternatif transportasi darat.

Sebagai wilayah yang padat penduduk, maka Kelurahan Kraton Kidul sulit tertata dengan baik dan rapi. Biasanya wilayah yang padat penduduk sering terkesan kumuh, dan sumpek, apalagi jika musim hujan. Air hujan yang mengguyur wilayah tersebut mudah terkena banjir, karena terbatasnya saluran air yang ada yang seharusnya mengalirkan air hujan ke laut. Namun karena penduduknya rata-rata sudah tinggal puluhan tahun di wilayah tersebut mereka tidak merasakan hal demikian, karena dianggap sebagai hal yang biasa. Sementara itu Kantor Kelurahan berada di jalan raya, sehingga akses warga untuk ke kelurahan tidak sulit. Apalagi Kelurahan Kraton Kidul hanya terbagi dalam 3 RW, ini mempermudah koordinasi antar warga.

Kondisi wilayah Kelurahan Kraton Kidul yang padat, dimana jumlah penduduk tidak diimbangi dengan

luas wilayah, menyebabkan masyarakat Kraton Kidul hidup dalam wilayah padat. Bahkan wilayah belakang kantor kelurahan masih menjadi sengketa, karena tanah tersebut milik PT KAI. Sehingga warga yang tinggal di sekitar wilayah tersebut rawan untuk terkena pengusuran. Hal ini pula yang menjadi pemikiran perangkat kelurahan, mengingat mereka yang tinggal di situ adalah warga yang sudah hidup selama puluhan tahun hingga beranak cucu. Aparat Kelurahan juga telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan berbagai program yang terkait dengan pengurangan angka kemiskinan di wilayah Kraton Kidul. Misalnya dengan memberikan berbagai pelatihan kepada warga, maupun dengan memberikan bantuan dalam bentuk hibah melalui BKM. Hal ini dilakukan karena staf kelurahan tidak mampu menangani semua kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat, sehingga perlu menggandeng pihak lain sebagai mitra kelurahan. Padatnya jumlah penduduk juga tidak mudah untuk melakukan berbagai program pengentasan kemiskinan. Namun upaya yang dilakukan aparat kelurahan layak diapresiasi karena karakteristik masyarakat yang padat penduduk seringkali sulit untuk dikendalikan, tetapi yang terjadi di kelurahan Kraton Kidul tidaklah demikian.

Berdasarkan sebaran angket kepada 100 warga, rendahnya Indeks Pembangunan Manusia di wilayah Kraton Kidul, salah satunya dipicu dari tingkat pendidikan penduduk, yang rata-rata SLTA, yaitu sebesar 44%. Hal ini menyebabkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap suatu informasi masih lemah. Keterlambatan dalam akses informasi sering menjadi alasan mereka dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Jika dilihat lebih lanjut lulusan sarjana hanya 2%, angka ini sangat kecil dibandingkan rasio jumlah penduduk yang seharusnya. Sebagai tenaga penggerak para lulusan ini belum memadai untuk dapat membantu masyarakat dalam pencarian berbagai akses informasi. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat digambarkan sebagai berikut :

Tingkat Pendidikan Warga

Masih rendahnya pendidikan masyarakat menyebabkan sedikitnya tenaga terdidik yang diharapkan mampu membantu masyarakat dalam menurunkan angka kemiskinan. Hal ini antara lain karena peluang kerja yang didapat pun tidak seperti yang diharapkan industri, yang rata-rata memberikan kesempatan kerja bagi lulusan sarjana. Oleh karena itu menjadikan lambannya dalam penurunan angka kemiskinan. Bahkan mereka yang sarjana pun juga akhirnya lebih tertarik untuk keluar dari wilayahnya karena mencari penghasilan yang lebih baik.

Rendahnya tingkat pendidikan sering menjadi pemicu pada kualitas pekerjaan seseorang, ini juga terjadi di Kraton Kidul. Tingkat pendidikan warga yang rata-rata SLTA menyebabkan pekerjaan yang didapat belumlah cukup memenuhi harapan hidup. Bahkan masih banyak yang tidak memiliki pekerjaan tetap, artinya mereka bekerja serabutan, tergantung pada permintaan pasar. Pekerjaan terbesar yang dijalani warga Kraton Kidul adalah buruh batik. Ini dapat dimengerti karena kota Pekalongan identik dengan batik, sehingga banyak warganya yang membuka usaha batik. Rata-rata mereka bekerja sebagai buruh lipat batik. Sebagai buruh batik, maka penghasilan yang didapat tidaklah cukup untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari, apalagi untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi. Dari hasil sebaran 100 angket kepada warga Kraton Kidul memperlihatkan juga bahwa pekerjaan sebagai ibu rumah tangga menempati posisi kedua setelah buruh, seperti terlihat pada diagram berikut ini :

Pekerjaan Warga Kraton Kidul

Kondisi masyarakat yang demikian mendorong sekelompok orang untuk membantu warga sekitarnya untuk keluar dari permasalahan kemiskinan yang mereka hadapi. Sekelompok orang tersebut terdorong untuk mengentaskan teman, tetangga, saudara mereka dari jurang kemiskinan yang selama ini erat dengan kehidupan mereka. Mereka menganggap bahwa dengan bergabung dalam suatu kelompok memungkinkan dapat ditemukan jalan keluarnya. Tidak hanya mengentaskan warga dari kemiskinan, tetapi juga mendorong warga untuk berpikir maju, sehingga mereka siap menghadapi tantangan global bersama-sama. Dengan tekad yang kuat untuk membantu sesama membangun daerahnya sendiri, mereka membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), yang kemudian dikenal dengan nama KIM Kraton Kidul. Kiprah dan nama KIM Kraton Kidul tidak hanya bergaung di tingkat kelurahan Kraton Kidul saja, tetapi sudah berkibar di kancah nasional.

KIM Kraton Kidul

Hapusnya Departemen Penerangan pada saat turunnya orde baru, telah menyebabkan kekosongan juru penerang yang ada di kabupaten/kota. Untuk mengisi kekosongan tersebut, Departemen Komunikasi dan Informatika melakukan perubahan paradigma komunikasi dengan masyarakat (*communication with the people*) tidak lagi menggunakan komunikasi untuk masyarakat (*communication for the people*). Sesuai dengan kesepakatan dalam WSIS, maka KIM diarahkan untuk menggunakan teknologi informasi dalam mengakses informasi, yang dalam implementasinya akan

disesuaikan dengan kemampuan menyediakan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, atau ketersediaan infrastruktur di lingkungan KIM berada.

Bahkan Juknis pengelolaan KIM disebutkan bahwa dalam pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh KIM bisa dilakukan dalam dua pola, yaitu :

Pola Pertama : KIM sesuai dengan kemampuannya dapat menyediakan sendiri infrastruktur Teknologi informasi dan komunikasi, seperti komputer dan jaringan internet, yang digunakan untuk memberikan layanan akses dan interaksi dengan berbagai sumber informasi.

Pola Kedua : KIM dapat memanfaatkan program-program pelayanan dan mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah ada baik di lingkungan pemerintah maupun di lingkungan masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki program pemberdayaan masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yaitu Desa Informasi, Community Access Point (CAP), Mobile Community Access Point (M-CAP) dan Warung Masyarakat Informasi (WARMASIF), dan program-program lain yang diselenggarakan oleh lembaga lainnya, seperti proyek percontohan mengurangi kemiskinan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau Pe-PP (Partnership for e-Prosperity for the Poor).

Penyaluran informasi dilakukan melalui wadah komunikasi masyarakat yang disebut Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), hal ini dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan informasi yang terjadi masyarakat. Regulasi yang dilakukan Kemeninfo melalui Permen Kominfo RI No. 08/PER/M.KOMINFO/6/2010, tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika dilakukan karena melihat kondisi masyarakat yang belum mempunyai kemampuan cukup untuk menelaah berbagai informasi yang disebabkan karena kondisi sosial, ekonomi, dan kultural yang beragam. Selain itu keterbatasan akses dan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan informasi belum memadai. Hal itu semakin diperkuat dengan kondisi wilayah geografis Indonesia yang menyebabkan terjadinya kesenjangan informasi di beberapa wilayah, seperti daerah terpencil, daerah perbatasan, ataupun wilayah tertinggal lainnya. Kondisi geografis yang demikian, menyulitkan dalam proses pengumpulan, penyebaran, maupun akses informasi, baik dari pengadaan perangkat keras (*hardware*) hingga tersedianya jaringan informasi (*software*). Kondisi tersebut akan menjadi lebih parah jika kemudian dalam hal mendapatkan pendidikan (*edukasi*) masyarakat juga tidak terjangkau, sehingga menganggap bahwa infor-

masi menjadi semakin tidak berguna manakala tidak dianggap tidak membawa manfaat bagi masyarakat.

Oleh karena itu, Kemeninfo sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam akses informasi merasa perlu untuk menggalakan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat untuk diberdayakan agar masyarakat dapat mengelola dan memanfaatkan informasi secara optimal. Masyarakat perlu dibangun kemampuannya dalam memanfaatkan informasi, karena peran pemerintah di bidang informasi dan komunikasi pada saat ini terbatas, sejak berlakunya otonomi dan di sisi lain masyarakat masih membutuhkan peran pemerintah.

Kemeninfo sebagai pihak yang terkait dengan aktivitas KIM memfasilitasi proses pembentukan KIM awal di berbagai kelurahan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kelurahan Kraton Kidul adalah sebuah kelompok yang tidak lahir serta merta, namun ada sesuatu yang sangat penting. Suatu ketika sekelompok orang menghadiri undangan pertemuan sekelompok warga yang menyebut diri sebagai Kelompok Warga Peduli Kraton Kidul. Perselisihan sering terjadi antara masyarakat dan LPM, namun bila kedua belah pihak, masyarakat dan LPM atau apapun lembaga yang ada di wilayah Kelurahan melakukan komunikasi, konfirmasi dan klarifikasi tidak akan terjadi perselisihan tersebut. Dalam rangka menjembatani kebutuhan masyarakat maka masyarakat membentuk Forum Komunikasi Masyarakat Kraton Kidul yang di kemudian hari, sebagian orang-orangnya menjadi Pengurus Kelompok Interaktif Masyarakat (KIM) Kraton Kidul yang terbentuk pada tahun 2006.

Dalam rangka penyampaian informasi secara transparan tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pemenuhan kebutuhan warga di bidang informasi maka pada tahun 2006 Pemkot Pekalongan melalui Bagian Humas dan Protokol menginstruksikan kepada Forum LPM untuk merumuskan pembentukan wadah interaksi bagi warga. Maka dengan difasilitasi oleh LPM di masing-masing Kelurahan di Pekalongan dibentuklah Forum Komunikasi Masyarakat atau Kelompok Interaktif Masyarakat (KIM) yang dilakukan secara demokratis. Proses fasilitasi melalui LPM telah dilakukan di 11 kelurahan yang tersebar di kota Pekalongan. Yang kemudian pada tahun 2008 berubah menjadi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan terus berkembang sehingga terwujud Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) kota Pekalongan seperti yang diharapkan Pemkot pada awal pembentukannya.

Sebagai kelompok baru KIM terus berusaha meyakinkan pada masyarakat akan eksistensinya, tahap demi tahap KIM melakukan hal-hal kecil, dan ternyata

yang kecil inipun sudah dianggap sebagai sebuah kemajuan oleh warga, dan dirasakan manfaatnya. KIM Kraton Kidul berdiri pada 26 Desember 2008, dengan latar belakang pembentukan KIM Kraton Kidul tidak lain untuk memberikan informasi yang aktual dan faktual kepada masyarakat.

Seringkali masyarakat menerima informasi yang salah bahkan melalui sumber yang tidak tepat, informasi yang diterima menyesatkan. Informasi yang salah bahkan dapat menjadi isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk menghindari adanya kesalahan bahkan fitnah, maka KIM Kraton Kidul perlu dibentuk dalam rangka memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang berbagai informasi yang beredar di masyarakat. Melalui KIM diharapkan masyarakat tidak resah terhadap segala persoalan yang dihadapi, baik itu persoalan pribadi, kelompok, maupun organisasi, baik menyangkut masalah kesehatan, pendidikan, bahkan ekonomi sekalipun.

Secara umum program-program dalam penggunaan dan pengelolaan berbasis TIK yang dapat dilakukan KIM adalah sebagai berikut:

Desa Informasi. Desa Informasi adalah merupakan integrasi dari Desa Berdering yaitu desa yang memiliki jaringan telepon, Desa internet yaitu desa yang memiliki jaringan internet, Desa yang memiliki Radio Komunitas dan Desa yang memiliki KIM serta yang memiliki jaringan televisi berlangganan dalam upaya mempercepat pengembangan masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan dalam upaya memperluas jaringan infrastruktur teknologi komunikasi dan informatika di pedesaan. Itu semua ditujukan dalam upaya mengembangkan terwujudnya masyarakat informasi Indonesia.

Community Acces Point (CAP) adalah sebuah pusat ataupun titik di mana masyarakat yang berada di pedesaan dapat melakukan komunikasi, serta mengakses informasi melalui sarana telekomunikasi dan informasi yang berada di satu tempat. Dalam pengembangannya, CAP dapat digambarkan sebagai warung internet (warnet) plus yang menyediakan layanan-layanan akses informasi dan komunikasi.

Mobile Community Access Point (M-CAP). M-CAP adalah sebuah kendaraan dengan fasilitas untuk pembelajaran bagi warga masyarakat dengan menyediakan akses informasi dan pengetahuan berbasis internet yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. Fasilitas M-CAP (Mobile Community Access Point) memiliki kelengkapan komputer, akses internet wifi, telepon, faksimili, printer, Pemutar video melalui LCD TV (VCD, DVD, dll), sound system dan generator listrik. Tujuan fasilitasi M-CAP adalah guna memperluas jang-

kauan layanan pemanfaatan telematika, serta memberikan kesempatan pemerataan pembelajaran bagi warga yang belum terjangkau layanan internet.

WARMASIF merupakan sebuah model pengembangan dari Community Access Point (CAP) yang merupakan sebuah outlet dimana masyarakat yang berada di suatu wilayah dapat melakukan komunikasi, akses informasi global, pemasaran melalui internet, transaksi online dan akses perpustakaan digital.

WARMASIF menitikberatkan pada layanan untuk menunjang aktivitas di bidang perdagangan dan industri barang atau jasa dengan memberikan layanan promosi dan transaksi bisnis. WARMASIF merupakan pengembangan usaha/perdagangan komoditas unggulan, melalui perdagangan elektronik (e-Commerce), meningkatkan layanan informasi dan pendidikan masyarakat. WARMASIF ditempatkan di Kantor Pos setempat dan dikelola oleh Kantor Pos setempat.

Pe-PP (Partnership for e-Prosperity for the Poor) Merupakan tempat mengakses informasi, berkomunikasi dan mendapatkan informasi mengenai layanan sosial dan ekonomi dengan menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi berupa komputer dan sambungan ke internet.

Satu persatu program digulirkan pemerintah dalam rangka memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk mencari dan memanfaatkan informasi sesuai kebutuhan masing-masing. Tentu saja dalam pelaksanaannya juga tergantung pada kondisi lokasi dan masyarakat setempat. Sehingga diperlukan pemilihan program yang tepat, dimungkinkan tiap daerah tidak sama kebutuhannya. Hal ini juga berlaku bagi KIM Kraton Kidul Kota Pekalongan.

Sebagai suatu kelompok KIM bekerja sesuai misi yang diembannya, yaitu mendorong masyarakat agar mampu mandiri. Dalam rangka mendukung proses pembangunan maka aktivitas yang dapat dilakukan KIM mengacu pada aturan yang sudah ditetapkan bersama yaitu melalui adalah ADINDA : Akses Informasi, Diskusi, Implementasi, Networking, Diseminasi Informasi, dan Aspirasi. Adapun aktivitas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Akses Informasi : melakukan aktivitas untuk mengakses informasi dari berbagai sumber baik sumber langsung maupun tidak langsung. Sumber langsung ialah dari lembaga pemerintah, dunia usaha dan lembaga layanan informasi lainnya dan pemuka pendapat atau tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan di bidang tertentu. Sumber tidak langsung ialah melalui media cetak dan elektronika termasuk juga internet. Pada saat KIM melakukan akses informasi, KIM sekaligus melakukan proses seleksi, yaitu

memilih informasi berdasarkan kebutuhan kelompok dan masyarakat sekitar. Pencarian maupun akses informasi dapat dilakukan secara pribadi, atau dilakukan secara bersama-sama di ditempat khusus KIM (sekretariat KIM).

Diskusi : setelah mengakses informasi kemudian dilakukan diskusi, tukar informasi, dan memecahkan masalah. Proses diskusi dilakukan dalam rangka tukar menukar informasi atau mencari solusi yang diperlukan masyarakat terkait informasi yang diterima. Selain itu diskusi dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan anggota KIM, jika diperlukan maka akan dicari pihak terkait untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat sekitar. Dengan demikian masyarakat akan lebih mudah untuk mengimplementasikan informasi yang mereka terima.

Implementasi : tahapan yang sebelumnya diputuskan akan menerapkan atau mendayagunakan pengetahuan atau informasi yang diperoleh Setelah dalam tahap diskusi diputuskan maka informasi tersebut tinggal diterapkan. Implementasi bisa dilakukan oleh orang perorang anggota KIM atau oleh kelompok dan anggota. Dengan mengimplementasikan atau mendayagunakan informasi tersebut diharapkan bisa memberikan manfaat bagi anggota atau masyarakat sekitar dalam peningkatan pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat.

Networking : merupakan hubungan antara KIM atau anggota KIM secara teratur dalam rangka saling tukar menukar informasi Jaringan yang dibuat KIM dilakukan antara KIM dengan pemangku kepentingan, seperti pemerintah, swasta, pers, dunia usaha, perbankan dan lain-lain. Melalui jaringan ini masyarakat maupun kelompok dapat merasakan manfaatnya. Jika informasi yang diterima masyarakat bermanfaat maka KIM dapat memperluas kerja sama dengan kelompok lain untuk kepentingan anggota. Kerjasama yang terjalin antara KIM dengan pihak lain dapat dimanfaatkan sehingga akan dapat mengembangkan potensi dan memberikan peluang agar masyarakat dapat lebih berkembang.

Diseminasi Informasi (Penyebaran Informasi) : menyebarkan informasi, bisa dilakukan bila informasi itu sudah diolah dan diyakini Penyebarluasan informasi dapat dilengkapi dengan proses yang sudah dilakukan dalam pengolahannya. Sehingga anggota kelompok tidak sekedar menerima informasi yang sudah matang, tapi juga memahami proses seleksi dan pengolahan informasi. Penyebarluasan informasi melalui kelompok, akan meningkatkan daya jangkauan dan kecepatan jangkauan. Jika KIM mempunyai anggota sebanyak 15 orang dan mampu melakukan penyebaran kepada 6 anggota yang lain maka akan terdapat sejumlah 90 orang yang sudah mendapatkan informasi. Hal ini akan ber-

beda jika 90 orang dikumpulkan secara langsung untuk mendapatkan suatu informasi.

Aspirasi : kegiatan KIM tidak saja menyebarkan informasi tetapi juga menyerap aspirasi masyarakat. Penyerapan aspirasi dapat dilakukan melalui pertemuan formal maupun informal antara KIM dengan masyarakat, dengan melibatkan pihak terkait ataupun tidak, atau melalui media yang lain. Aspirasi yang berasal dari masyarakat akan ditindaklanjuti oleh KIM dan disalurkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat maka KIM dapat secara teratur atau secara langsung menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah, pihak swasta, atau kelompok yang lain tergantung pada kepentingannya.

Meskipun sebagai suatu organisasi, namun dalam aktivitas yang dilakukan KIM Kraton Kidul tidaklah seperti layaknya organisasi formal. Setiap anggota dapat bertindak tidak sesuai dengan jabatan dalam struktur organisasi yang ada. Cara kerja yang ditempuh berdasarkan asas kekeluargaan, setiap anggota bisa menjalankan berbagai fungsi. Sehingga satu sama lain bisa saling mengisi, kerja tidak berdasarkan struktur yang ada, tetapi lebih pada pengabdian untuk membantu masyarakat agar dapat hidup lebih baik. Dalam kondisi apapun jalinan kebersamaan selalu menjadi acuan, rasa saling membutuhkan ditimbulkan pada setiap anggota tanpa kecuali. Hal ini membuat KIM Kraton Kidul mampu bertahan dalam menjalankan misinya meskipun berbagai tantangan hadir setiap saat. Tetapi ini tidak menyurutkan para anggotanya untuk terus bergabung dalam KIM Kraton Kidul.

Lokasi KIM Kraton Kidul yang terletak di gang memang jauh dari bentuk organisasi pada umumnya, yang biasanya terletak di jalan raya besar untuk memudahkan koordinasi. Namun demikian, lokasi tersebut tidak menjadi hambatan bagi KIM Kraton Kidul untuk bekerja sesuai fungsinya dalam masyarakat. Gang masuk untuk sampai ke Pos Lesehan KIM Kraton Kidul terletak di Jl. Veteran (Kraton Kidul) IV/10. Sejak awal pendirian tahun 2008 hingga tahun 2010 rumah ketua sebagai sekretariat KIM, maka pada tahun 2011 KIM berhasil mengontrak rumah petak selama 2 tahun yang masih berlokasi di gang tersebut, yang menempati gang IV/4 yang dijadikan sekretariat KIM yang akrab disebut Pos Lesehan KIM. Namun inipun tidak berlangsung lama, tepat 2 tahun KIM harus memutar otak untuk mencari lokasi baru sebagai sekretariat. Ini dikarenakan waktu kontrak yang sudah habis masa pakainya. Namun dengan kegigihan KIM untuk mencari dana, pada Pebruari 2014 Pos Lesehan KIM berpindah tempat, namun masih sekitar gang IV, hanya berbeda RT saja. Perpindahan ini bukanlah menjadi rintangan bagi KIM untuk terus berjuang dalam pemberdayaan

masyarakat.

Perpindahan lokasi tersebut tidak dapat dihindari karena KIM memang tidak memiliki pos/lokasi tetap, tergantung pada kemampuan finansial KIM. Pertimbangan pos pindah dari awal karena jika di rumah salah satu anggota maka akan mengganggu kenyamanan pemilik rumah, dan memang pada saat itu kondisi keuangan KIM belum memungkinkan untuk mengontrak rumah sebagai pos KIM. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kas KIM mengalami peningkatan karena adanya permintaan untuk menjadi pembicara, serta tampilnya kelompok musik KIM dalam berbagai acara. Dari kegiatan tersebut mereka berusaha untuk menyisihkan uang agar KIM dapat terus hidup dan berkiprah di masyarakat.

Sebagai suatu organisasi KIM Kraton Kidul merasa bahwa tugas dan pekerjaan mereka harus direncanakan dengan baik. Oleh karena itu mereka berusaha untuk membuat rancangan program kerja KIM yang diharapkan dapat dijadikan pedoman KIM Kraton Kidul dalam mengemban tugasnya dan dalam bekerja akan lebih terarah pada satu tujuan yang diharapkan. Untuk memudahkan koordinasi serta adanya arahan dari Kemeninfo Pusat dan Dishub Kominformasi Kota Pekalongan, maka KIM Kraton Kidul melengkapi diri dengan Pengurus KIM Kraton Kidul. Adanya kepengurusan ini dilakukan agar kegiatan KIM dapat lebih terencana dan dalam pelaksanaannya mudah untuk melakukan koordinasi satu sama lain. Kepengurusan ini juga dilakukan mengingat tugas KIM tidak hanya di internal lingkungan kelurahan saja, tetapi dimungkinkan di luar wilayah, bahkan kegiatan lain yang bertaraf internasional. Layaknya suatu organisasi, KIM Kraton Kidul juga memiliki struktur organisasi, meskipun demikian tidak baku. Setiap anggota KIM dapat menjalankan berbagai fungsi, sehingga kelompok ini sangatlah dinamis dan fleksibel. Termasuk dalam keanggotaannya, siapapun dapat bergabung dalam KIM selama mereka mempunyai tujuan yang sama dengan KIM.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Akses Informasi

Tugas yang diemban KIM Kraton Kidul adalah mewujudkan masyarakat aktif, peduli, peka dan memahami informasi, bahwa masyarakat aktif mencari, peduli pada segala bentuk informasi dan peka terhadap informasi baru yang diperolehnya, serta berusaha memahami informasi yang diterimanya. Selanjutnya masyarakat memilah informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat tentunya dengan melakukan diskusi lebih dulu dengan anggota kelompok untuk memilih

informasi yang tepat disampaikan kepada masyarakat. Sehingga KIM Kraton Kidul dapat dijadikan sebagai mitra dialog dalam mendukung pelaksanaan kebijakan publik dan monitoring pelaksanaannya.

Meskipun belum semua kebutuhan masyarakat akan informasi dapat terpenuhi, namun upaya yang dilakukan KIM Kraton Kidul cukup memberikan angin segar bagi warga dalam akses informasi. Hal ini membuktikan bahwa KIM Kraton Kidul mempunyai peran besar bagi perubahan sosial. Masyarakat memberikan pengakuan bahwa kehidupan mereka menjadi lebih baik sejak adanya KIM Kraton Kidul. Namun perubahan tersebut tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, usaha keras harus terus dilakukan baik melalui KIM maupun secara individual. Setelah mereka memahami pentingnya informasi bagi diri mereka, masyarakat semakin menyadari bahwa jika ingin keluar dari kemiskinan maka mereka harus berjuang lebih keras lagi. Walaupun mereka mengakui bahwa hidup mereka menjadi sedikit lebih baik sejak adanya KIM, tetapi tidak kemudian membuat mereka juga bergantung sepenuhnya kepada KIM. Masyarakat bahkan saling bertukar informasi, sehingga budaya mencari informasi bukanlah hal baru untuk mereka. Mereka menyadari bahwa informasi menjadi suatu kebutuhan yang tak terelakkan dalam kehidupan mereka. Perubahan yang mereka rasakan setelah adanya KIM dapat dilihat dalam diagram berikut ini :

Perubahan sosial ekonomi masyarakat setelah ada KIM

Berbagai aktivitas yang telah dilakukan KIM tersebut sesuai dengan amanat WSIS bahwa kemampuan semua orang untuk mengakses dan menyumbangkan informasi, gagasan, dan pengetahuan menjadi hal penting dalam membangun masyarakat informasi, begitu juga KIM. Melalui KIM masyarakat dapat saling berbagi pengetahuan dalam ranah global, sehingga dapat menghilangkan hambatan terhadap akses informasi. Kegiatan pertukaran informasi tersebut akan sangat bermanfaat tidak hanya menunjang bidang ekonomi, tetapi juga pendidikan, kesehatan, bahkan kebudayaan. Ilmu pengetahuan mempunyai peran sentral dalam membangun masyarakat informasi. Pendidikan, pengetahuan, informasi, dan komunikasi merupakan inti kemajuan dalam mencapai kesejahteraan. Sementara itu teknologi informasi dan komunikasi akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mencapai kemajuan yang lebih dari sebelumnya. Sehingga akan meningkatkan harkat dan martabat kita sebagai manusia.

Namun demikian dalam impelentasinya KIM

Kraton Kidul tetap mengedepankan budaya yang berkembang di masyarakat. Pemeliharaan warisan budaya menjadi kunci keberhasilan KIM Kraton Kidul dalam mendorong masyarakat menggunakan berbagai akses informasi. Filosofi Jawa mendasari cara kerja KIM Kraton Kidul, bahkan anggota mempercayai bahwa hidup ini ibaratnya orang “mampir ngombe”. Sehingga ketika manusia hidup hendaknya selalu berbuat kebaikan untuk diri dan orang lain, karena hidup itu hanya sebentar. Bekal kebaikan akan menentukan hidup kita di kehidupan yang lain. Hal ini dipercayai sebagai filosofi dasar KIM Kraton Kidul dalam setiap aktivitasnya. Jika dilihat dalam bagan berikut ini, terlihat bahwa KIM Kraton Kidul telah mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dalam akses informasi. Bahkan dari beberapa hal masyarakat sangat terbantu dengan kehadiran KIM Kraton kidul.

Pada saat ini KIM Kraton Kidul termasuk dalam kategori KIM 3, dimana KIM Kraton Kidul sudah memiliki kemampuan memanfaatkan internet sebagai media untuk mengolah maupun menyebarkan informasi kepada masyarakat. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat dimaksudkan agar masyarakat semakin mengetahui kiprah KIM, sehingga masyarakat dapat menjadikan KIM sebagai mitra dalam pencarian informasi terkait dengan kebutuhan masing-masing. Melalui internet ini, KIM tidak hanya menyampaikan informasi yang bersifat umum saja, tetapi juga memberikan kesempatan kepada anggota KIM untuk membangun jejaring dengan pihak lain, seperti pemerintah maupun swasta. Penggunaan akses internet ini akan mampu memberikan daya tarik pihak swasta sebagai investor dalam berbagai produk yang sudah dihasilkan masyarakat, terutama produk yang mempunyai daya saing nilai jual.

Berbagai informasi yang ada didiskusikan oleh KIM, bahkan mengolah informasi tersebut sehingga mudah dipahami masyarakat. Tidak hanya mendiskusikan, KIM juga mengkritisi berbagai informasi yang beredar di media massa. Salah satunya adalah gagasan untuk mematikan televisi pada jam 19.00-21.00 WIB. Gagasan ini dilakukan dalam rangka untuk menyadarkan masyarakat bahwa tidak semua tayangan di televisi layak untuk ditonton dan dicontoh. KIM menganggap bahwa pada jam tersebut banyak tayangan yang tidak mendidik masyarakat, tidak mempunyai manfaat bagi masyarakat, bahkan bagi anak-anak

Berdasarkan jawaban 100 orang warga Kraton Kidul merasakan manfaatnya ketika KIM hadir di tengah masyarakat, khususnya dalam akses informasi. Masyarakat tidak hanya mudah memahami informasi yang beredar, namun mereka juga lebih cepat dalam mengakses se-

tiap informasi terbaru, seperti terlihat dalam tabel berikut ini :

Keterlibatan KIMKraton Kidul dalam Akses Informasi

Agar masyarakat mudah dalam memahami berbagai informasi, KIM Kraton Kidul juga menyesuaikan kemasan pesan dalam berbagai ragam bahasa dan gaya., untuk bahasa banyak menggunakan istilah Jawa, khususnya bahasa Pekalongan. Hal ini dilakukan dengan harapan bahwa masyarakat dengan tingkat pendidikan bawah pun dapat lebih mudah memahami maksud dari informasi tersebut. Seringkali ditemukan informasi yang diberikan kepada masyarakat menggunakan bahasa yang memerlukan penjelasan lagi. Untuk itulah KIM Kraton Kidul mendesign ulang sesuai kebutuhan masyarakat sekitar. Hal ini pula yang memang ditekankan dalam membangun masyarakat informasi, bahwa keragaman bahasa dan format mendapat prioritas tertinggi dalam menyebarkan informasi. Nilai-nilai lokal harus lebih dikedepankan karena ini akan mendorong adanya perubahan. Selain itu akan membangkitkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Tentunya ini tidak terlepas dari adanya kreativitas pengelola dalam hal ini anggota KIM Kraton Kidul untuk terus inovatif dalam mengembangkan berbagai akses informasi. Ketersediaan informasi bagi masyarakat sangat penting dalam membangun peradaban manusia sebagai salah satu wujud dari budaya.

Dalam kegiatan yang berbasis TIK, KIM ikut andil bagian dalam mengentaskan melek informasi masyarakat kelurahan Kraton Kidul. Hal ini sesuai dengan kebijakan Pemkot Pekalongan tentang penggunaan TIK dalam akses informasi. Penerapan TIK Kota Pekalongan sudah dimulai sebelum tahun 2008, tetapi strategi dan kebijakan pengembangan e-government Kota Pekalongan baru dimulai pada tahun 2008 melalui momentum Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (HAKTEKNAS) Pemerintah Kota Pekalongan melakukan Kick off Meeting pengembangan TIK pada bulan Agustus 2008 dengan pencaanangan salah satu program unggulan yaitu migrasi ke legal software berbasis free open source software (FOSS) yang diharapkan tuntas pada pertengahan 2010.

Dalam perjalanannya program migrasi ke Legal Software berbasis FOSS yang dijalankan pemerintah Kota Pekalongan gelombang I (2008-2011) melalui aplikasi perkantoran dan sekarang memasuki gelombang II (2011-2012) dengan aplikasi khusus. Latar belakang diberlakukannya kebijakan FOSS dalam rangka menjawab tantangan dunia untuk 'stop penggunaan produk illegal'. Adapun landasan pemikiran kebijakan migrasi

ini meliputi :

1. Kenyataan bahwa sarana dan prasarana pemerintah Kota Pekalongan tahun 2008 menggunakan aplikasi atau software illegal (bajakan)
2. Kondisi tersebut memberikan contoh buruk bagi masyarakat Kota Pekalongan, bahwa Pemda telah melakukan pelanggaran hukum, yaitu UU No.19/2002 tentang Hak Kekayaan Intelektual.
3. Migrasi ke legal software legal berbasis FOSS dilakukan dalam rangka melakukan antisipasi kemungkinan adanya gangguan layanan publik akibat tindakan hukum terhadap penggunaan software illegal.
4. Penggunaan software legal berbasis FOSS dilakukan untuk mewujudkan 'manajemen barokah', bahwa untuk mencapai tujuan mulia maka harus bekerja dengan mulia (alat dan barang legal)
5. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berbasis FOSS mendorong terjadinya proses pembelajaran kembali, karena untuk mengadopsi hal baru maka orang harus belajar.

Proses perubahan budaya dengan teknologi baru memang tidak mudah, apalagi di hampir semua kegiatan, program windows merajai, sehingga menjadi terasa sulit ketika orang harus berpindah ke program linux. Sebetulnya hal ini tidak menjadi masalah, jika orang mempunyai motivasi tinggi untuk mencapai tujuannya. Dalam rangka mengurangi kesenjangan tersebut, Dinas Kominfo Kota Pekalongan telah membuat suatu kebijakan yang memungkinkan perpindahan tersebut tidak menjadi kendala sebuah kota untuk maju. Berbagai aktivitas yang terkait dengan program open source telah dilakukan, misalnya :

1. Sosialisasi ke berbagai kelurahan dengan mengundang tokoh masyarakat yang tergabung dalam berbagai organisasi sosial, seperti : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), guru, mahasiswa, KIM, dan Karang Taruna
2. Melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait seperti : lembaga pemerintah maupun lembaga lain yang banyak berhubungan dengan pemerintah Kota Pekalongan.

Untuk mendukung program tersebut, Walikota Pekalongan menguatkan keputusannya dalam Keputusan Walikota Pekalongan No.020/024 Tahun 2010 tentang Kewajiban Pemakaian dan Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Free Open Source Software (FOSS) di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dan dikuatkan lagi melalui Peraturan Walikota Pekalongan No.12A tahun 2010 tentang Migrasi Perangkat Lunak Legal Berbasis Free Open Source Software (FOSS) Pemerintah Kota Pekalongan. Dalam Peraturan Walikota tersebut tertuang tujuan migrasi FOSS pada

pasal 2 bahwa : Meningkatkan kemandirian, daya saing, kreatifitas serta inovasi Daerah.; Melakukan upaya dalam rangka menguasai, mendayagunakan dan memfasihkan teknologi informasi.; Mempercepat penguasaan teknologi informasi melalui pengembangan dan pemanfaatan FOSS.; Menggunakan perangkat lunak legal di setiap SKPD.; Menyebarkan pemanfaatan FOSS di Pemerintah Kota.; Melakukan efisiensi anggaran pengadaan perangkat lunak legal

Untuk mendukung Peraturan Walikota Kota Pekalongan tersebut, maka Dinas Kominfo memberikan bantuan dalam bentuk program ‘telecenter’ dengan memberikan seperangkat komputer dengan program FOSS (linux).Pemberian bantuan ini hanya sebagai stimulus saja, agar KIM yang tersebar di Kota Pekalongan juga ikut terlibat dalam proses pertukaran informasi dan penyebaran informasi.

Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, KIM juga tidak mau ketinggalan dalam pemanfaatan media digital tersebut. Pembuatan informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat juga tidak terlepas dari penggunaan internet. KIM mencari berbagai informasi terkait kegiatan penyebaran informasi, misalnya pencarian gambar Tomcat, nyamuk filariasis, nyamuk aedes agepty, ataupun informasi lain yang tidak ditemukan di media cetak.Penggunaan internet juga dilakukan sebagai ajang promosi tentang segala aktivitas yang telah dilakukan KIM Kraton Kidul dengan masyarakat. Melalui internet pulalah nama KIM Kraton Kidul semakin mendapat pengakuan dari berbagai pihak. Bahkan KIM Kraton Kidul ditunjuk sebagai KIM percontohan bagi KIM yang ada di Indonesia.

Dalam rangka menjawab tantangan global, terutama yang terkait dengan implementasi atas Peraturan Walikota No.12A tahun 2010, dengan memberikan berbagai jenis pelatihan bagi masyarakat, khususnya bagi pengangguran dan pekerja serabutan. Tujuan dari pelatihan tersebut agar masyarakat dapat merubah nasibnya, terutama menambah nilai ekonomi bagi kehidupannya. Berbagai cara ditempuh dalam rangka membuat masyarakat melek informasi. Alurkerjayang digunakan KIM Kraton Kidul adalah dengan memanfaatkan berbagai media informasi, termasuk internet. Proses penyebaran informasi yang dilakukan KIM Kraton Kidul . Lihat Gambar 1

Pemanfaatan berbagai diperlukan, mengingat kondisi masyarakat yang sangat beragam, untuk itu diperlukan pemikiran yang strategis dalam menentukan media yang akan digunakan dalam akses informasi kepada masyarakat. Namun demikian, penggunaan internet tetap menjadi pilihan dalam melakukan ebrbagai bentuk komunikasi baik di lingkungan internal maupun

eksternal. Ini juga dalam rangka menerapkan aturan Pemkot Pekalongan yang memanfaatkan internet untuk menyampaikan berbagai kebijakan yang telah dibuat. Melalui internet ini, KIM melakukan pengolahan informasi kembali sesuai kebutuhan masyarakat sekitar.

Beberapa anggota KIM telah memanfaatkan internet dalam memberi nilai tambah bagi kehidupan mereka, tidak hanya sosial budaya, tetapi juga secara ekonomi. Anggota KIM sering ikut bergabung dalam berbagai kegiatan pameran, terutama pameran industri. Salah satu yang telah berhasil adalah industri batik dengan menggunakan pewarna asli yang berasal dari tumbuhan langsung, tidak menggunakan zat kimia. Tentu saja hal ini sangat menguntungkan tidak hanya KIM sebagai kelompok, namun juga individu yang bersangkutan dapat meningkat kehidupan ekonominya. Dan yang paling penting dapat menekan angka pencemaran limbah akibat penggunaan pewarna kimiawi yang selama ini digunakan dalam proses pewarnaan batik. Seperti diketahui beberapa desa sudah banyak yang tercemar limbah batik, sehingga airnya tidak layak untuk dikonsumsi. Adanya inovasi dalam penggunaan pewarna asli ini menunjukkan bahwa KIM juga ikut terlibat dalam penataan lingkungan yang sehat. Oleh karena itu tidak mengherankan jika masyarakat mendukung eksistensi KIM ditengah kehidupan mereka. Aktivitas KIM telah dirasakan manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat sekitar. Dukungan terhadap KIM Kraton Kidul semakin besar, ini pula kemudian mendorong Pemkot untuk terus mendukung aktivitas KIM di masyarakat. Bahkan KIM Kraton Kidul sering diberi kesempatan untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan yang bertaraf nasional. Tentu saja ini tidak terlepas dari kerjasama berbagai pihak yang terkait dengan kegiatan KIM. Sehingga tidaklah mengherankan jika eksistensi KIM semakin dipercaya sebagai lembaga yang mandiri yang mampu membawa masyarakat untuk mandiri, kreatif dan inovatif.

Dukungan terhadap Eksistensi KIM

Tidaklah mengherankan jika masyarakat sekitar semakin menyadari bahwa mereka semakin bergantung pada setiap informasi yang beredar di sekitar mereka. KIM Kraton Kidul mampu membangkitkan minat masyarakat untuk terus berubah, terutama dalam pemanfaatan TIK. Dukungan terhadap KIM Kraton Kidul juga diberikan oleh Pemkot Pekalongan, yaitu dengan memberikan berbagai bentuk pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemkot Pekalongan telah mencanangkan penyediaan TIK, internet di setiap RT. Ini dilakukan dalam rangka membangun melek informasi masyarakat sampai dilevel bawah. Melalui penyediaan

internet ini diharapkan masyarakat dapat dengan mudah dan cepat untuk mengakses setiap informasi yang mereka butuhkan. Selain itu juga digunakan sebagai ajang media informasi bagi Pemkot kepada masyarakat. Sehingga semua kebijakan yang sudah dibuat dan dikeluarkan oleh Pemkot Pekalongan dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat hingga di tingkat RT.

Pengadaan media online ini dimaksudkan agar masyarakat lebih mudah mencari berbagai peraturan Pemkot Pekalongan. Penempatan media inipun di bawah koordinasi KIM, sehingga jika ada informasi yang tidak dipahami masyarakat maka mereka dapat langsung melakukan diskusi dengan anggota KIM. Terobosan ini dilakukan karena selama ini ditengarai setiap peraturan pemerintah seringkali tidak sampai di tingkat bawah. Meskipun masih terbatas dalam penyediaan media, namun langkah yang sudah dilakukan Pemkot Pekalongan tersebut dapat menekan gap informasi antara pusat dan daerah. Inipun tidak dapat dilakukan Pemkot sendirian, karena pada akhirnya yang paling banyak berhubungan dengan masyarakat adalah KIM, maka koordinasi terus dilakukan antara KIM dengan Pemkot Pekalongan. Arahan dan bimbinganpun terus dilakukan dengan melibatkan pihak terkait lainnya tergantung kebutuhan masyarakat, khususnya dalam pelatihan TIK, penguasaan komputer maupun pelatihan lainnya.

Pengembangan KIM merupakan salah satu

upaya strategis dalam menyongsong peradaban masyarakat informasi, dengan harapan bahwa semua lembaga dapat terhubung dalam suatu jaringan komunikasi dan informasi. Tidak mengherankan jika KIM Kraton Kidul terus berupaya dan mengembangkan KIM berbasis teknologi. Harapan untuk mendorong masyarakat untuk mandiri dan melakukan inovasi menjadi tantangan besar. Penguasaan teknologi informasi akan mendorong tumbuhnya kreativitas masyarakat untuk memiliki daya saing, tidak hanya di level lokal tetapi juga di tingkat nasional, bahkan dunia. Semangat yang dimiliki KIM Kraton Kidul untuk menjadi bagian tata dunia baru telah dibuktikan melalui berbagai aktivitas yang telah dilakukan.

Kesimpulan dan saran

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) memiliki potensi penting dalam membangun masyarakat informasi. Berbagai aktivitas yang dilakukan KIM Kraton Kidul telah mampu meningkatkan kehidupan masyarakat baik sosial, budaya, bahkan ekonomi. Pengembangan TIK telah mampu diadopsi masyarakat sehingga masyarakat dapat mendayagunakan teknologi tersebut untuk meningkatkan kehidupannya secara material. Masyarakat mulai menyadari pentingnya penguasaan teknologi informasi dalam menunjang kehidupan mereka. Dengan tetap mengedepankan kearifan lokal masyarakat mampu bersaing di era digital ini.

Gambar 1. Penggunaan Media Komunikasi dalam Penyebaran Informasi



(Sumber : Manik Sunuantari; 2014; 368)

Tentu saja ini tidak dapat dilepaskan dari fungsi KIM dalam masyarakat.

Dalam bidang pendidikan KIM, telah mendorong masyarakat untuk dapat mengenyam pendidikan lebih baik dari sebelumnya. Melalui kerjasama dengan berbagai instansi terkait, masyarakat dapat merasakan pendidikan gratis, bahkan melalui berbagai informasi mereka mendapatkan informasi pekerjaan yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kemampuan finansialnya. Akses informasi yang baik menjadi kunci dalam mendorong masyarakat mandiri dan inovatif. Oleh karena itu sebagai mitra masyarakat dan pemerintah KIM telah menjembatani kesenjangan informasi yang selama ini terjadi. Melalui penguasaan TIK, akan terbangun komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat dengan cepat dapat mengakses semua peraturan maupun kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah baik daerah maupun pusat. Keterlibatan KIM dalam penguasaan TIK mempunyai andil penting, yaitu melalui berbagai pelatihan yang dilakukan KIM, termasuk pelatihan penggunaan media online.

Peran pemerintah sangat dibutuhkan tidak hanya dalam pengadaan media, tetapi juga akses informasi. Keberlanjutan setiap program perlu dikoordinasikan dengan lembaga lain, sehingga akan satu sama lain akan saling terintegrasi. Keberhasilan membangun masyarakat informasi tidak hanya bertumpu pada pemerintah saja, tetapi juga keinginan masyarakat untuk berubah. Kemitraan yang terjalin antara pemerintah, KIM, dan masyarakat hendaknya terus dilakukan secara berkesinambungan.

Sebaiknya dilakukan penelitian di lokasilain sebagai

bahan komparasi, sehingga akan didapat data yang lebih komprehensif untuk menggali potensi KIM tidak hanya di bidang penguasaan TIK tetapi juga di bidang lainnya.

Daftar Pustaka

- Dilla, Sumadi., Komunikasi Pembangunan Pendekatan Terpadu, Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2007
- Pace, R.Wayne & Faules, Don F, Organizational Communication, EnglewoodsnCliffs,N.J, Prentice Hall, 2013
- Rakhmat, Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, Bandung, Remadja Rosdakarya, 2011
- Suharto, Edi, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Webster, Frank, The Theories of The Information Society, London and New York, Routledge, 2006

Bahan Bacaan Lain

- Depkominfo, Dokumen Hasil Sidang KTT Dunia Mengenai Masyarakat Informasi, Geneva 2003-Tunis 2005, 2006,
- _____, Kerangka Acuan Arah Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), 2006
- Juknis KIM, Kemeninfo, 2010
- Kemeninfo RI, Menuju Masyarakat Informasi Indonesia, tentang Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2010
- Sunuantari, Manik, Kelompok Informasi Masyarakat Kraton Kidul Menuju Masyarakat Informasi yang Sejahtera; 2014